



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 216 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai objek pengukuran kualitas kebijakan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LKPP Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengukuran IKK LKPP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan kepada Enumerator pada Unit Organisasi yang dipimpinnya dalam pelaksanaan pengukuran IKK LKPP Tahun 2023; dan
 - b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengukuran IKK LKPP Tahun 2023 secara berkala.

2. Admin Instansi:
 - a. memasukkan daftar kebijakan yang akan menjadi populasi pengukuran IKK untuk kebijakan 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan;
 - c. menentukan anggota Tim Pengukuran IKK LKPP Tahun 2023 yang akan menjadi Enumerator sesuai jumlah sampel kebijakan yang akan dinilai;
 - d. membuat akun Enumerator LKPP dalam Sistem Informasi (SI) IKK;
 - e. mengisi data teknis profil Enumerator LKPP;
 - f. membagi sampel kebijakan terpilih ke masing-masing Enumerator yang telah aktif dalam SI IKK;
 - g. memantau hasil pengisian data penilaian IKK dari seluruh Enumerator LKPP; dan
 - h. melakukan konfirmasi pengiriman hasil pengisian IKK dari Enumerator ke Koordinator Instansi (Lembaga Administrasi Negara/LAN).

3. Enumerator:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung penilaian IKK dalam bentuk namun tidak terbatas pada telaahan staf, *policy brief*, *policy paper*, hasil kajian, dokumentasi kegiatan, dan/atau laporan pemantauan dan evaluasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai;

- c. melakukan *input* seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen IKK;
 - d. membahas relevansi bukti dukung dengan indikator penilaian IKK sesuai dengan *Toolkit* IKK yang telah disediakan oleh LAN;
 - e. melakukan pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen IKK dan proses *input* bukti dukung dalam SI IKK; dan
 - f. melakukan konfirmasi pengiriman hasil *input* IKK kepada Admin Instansi.
4. Tim Sekretariat:
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan Pengukuran IKK;
 - b. menyiapkan kertas kerja Pengukuran IKK dan menyiapkan tempat penyimpanan bukti dukung IKK secara digital;
 - c. membantu persiapan Unit Organisasi Pengampu Peraturan LKPP dalam menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung Pengukuran IKK;
 - d. menyiapkan kebutuhan Narasumber untuk membantu memberi penjelasan dalam penyusunan bukti dukung Pengukuran IKK; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan LAN terkait persiapan SI IKK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pengukuran IKK LKPP Tahun 2023 melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 189 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2023

NOMOR : 216 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 APRIL 2023

DAFTAR PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG MASUK DALAM KRITERIA PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2023

No	Peraturan	Pemrakarsa
1.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
2.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
4.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

No	Peraturan	Pemrakarsa
	2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
5.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengadaan PBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
6.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia PBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi
7.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Pasar Digital Pengadaan dan Direktorat Sistem Pengadaan Digital
9.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

No	Peraturan	Pemrakarsa
	2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
10.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
11.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2023

NOMOR : 216 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2023

Kedudukan dalam Tim	Nama
Pengarah	: <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Utama2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus4. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan5. Direktur Sistem Pengadaan Digital6. Direktur Pasar Digital Pengadaan7. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan8. Direktur Sertifikasi Profesi9. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat10. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah
Admin Instansi	: Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Enumerator	: <ol style="list-style-type: none">1. Zulhenny2. Octo Army3. Dara Kumala Arumbuana4. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi5. Sugianto6. Yohana Surat Payon Philips

Kedudukan dalam Tim	Nama
	<ol style="list-style-type: none">7. Imam Arumsyah8. Ali Masrochan9. Kemala De Kristie10. Astri Erviana11. Mega Chandra Sera12. Niken Novia Sitaresmi13. Dedi Setiawan14. Lingga Sakti15. Abi Tonjo Buono16. Bernadus Sayratu Kuway17. Andayani Nurfaizah18. Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal
Tim Sekretariat	: <ol style="list-style-type: none">1. Rinaldi Morintosh2. Rasmita Juliana Sitepu3. Ardian Hoppin Sitompul4. Benny Leopold Dumais5. Cherish Shery Desarya6. Asih Riska Nurmasari7. Yogie Prastiyans8. Mahatmya Widyasri9. Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI